

## EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PROVINSI PAPUA BARAT TA 2017



*rakyatmuria.com*

Pemerintah Provinsi Papua Barat terus melakukan evaluasi penyerapan anggaran tahun 2017. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan pembangunan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Faktor yang menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran APBD tahun 2017 diantaranya ialah lambatnya proses lelang yang dilaksanakan melalui LPSE.

Sekitar 500 lebih paket proyek di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat masih dalam proses tender. Kondisi ini berpengaruh pada penyerapan APBD 2017 yang hingga awal Agustus baru mencapai 28,39 persen. Menindaklanjuti instruksi lisan Presiden RI, maka Pemprov Papua Barat mengupayakan agar paket proyek tersebut segera dikerjakan. Tender proyek lewat LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang mulai tahun 2017 bakal dievaluasi.

Inspektur Prov Papua Barat, Sugiyono,SH mengatakan akan mengevaluasi daya serap anggaran dan ULP (unit layanan pengadaan) karena daya serap anggaran saat ini rendah. Tahun depan, orang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) harus benar-benar orang yang berkompeten dan akan dilatih. Mengingat, Presiden memperingati bahwa daerah yang daya serap anggarannya rendah akan diberi sanksi.

Sugiyono telah mengkonsep solusi yang akan ditawarkan agar penyerapan anggaran lebih baik. Pertama, paket proyek bernilai di bawah Rp 500 juta bisa dilakukan dengan penunjukan langsung rekanan/kontraktor khusus pengusaha asli Papua. Kedua, pekerjaan bernilai besar dapat dipecah-pecah. Dalam pembinaan terhadap pengusaha asli Papua konsep ini tak melanggar undang-undang. Dalam rangka pembinaan terhadap pengusaha asli Papua bisa dilakukan pemaketan pekerjaan. Artinya pekerjaan dipecah-pecah menjadi 500 juta yang penting untuk

pengusaha asli Papua, tidak boleh untuk pengusaha yang lain. Langkah ketiga, sisa waktu yang tersisa 3 bulan harus dimanfaatkan. ULP dan Pokja harus bekerja cepat tak mengulur-ulur waktu.

Inspektur berharap, awal September kontrak harus sudah ditandatangani dan pencairan anggaran tahap awal sekitar 20-30 persen. Para rekanan sudah harus jalan melakukan tugas pekerjaan fisik, pengadaan barang dan jasa. Hal-tersebut merupakan solusi yang sementara dikonsepkan untuk percepatan penyerapan anggaran.

#### **Sumber Berita:**

1. Ekonomi Akurat, 2017, *Serapan Anggaran APBD Papua Masih Rendah*, Kamis, 7 Desember 2017.
2. Radar Sorong, 2017, *Serapan APBD Rendah, Inspektur Siapkan Tiga Konsep*, Kamis, 7 Desember 2017.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan sebagai berikut:

*Angka 8 menyebutkan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

*Angka 16 menyebutkan : Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.*

- Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dijelaskan sebagai berikut: Kementerian negara/lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya, dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada tahun anggaran berikutnya, yang selanjutnya disebut dengan sanksi.
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan dijelaskan sebagai berikut:

*Angka 6 menyebutkan : Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi lainnya yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.*

*Angka 12 menyebutkan : Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.*